

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH(BOS) UNTUK PENGEMBANGAN GURU DAN FASILITAS SEKOLAH  
DI SMP KOTA SEMARANG**

Oleh :

Refgi Septian, Dra. Margaretha Suryaningsih, MS  
**Departemen Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024)7465407 Faksmile (024)7465405  
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

**ABSTRACT**

*The implementation of School Operational Assistance (BOS) is one of the government policies to aimed at improving the quality of education for all levels of society by funding school operation activities. But School Operational Assistance (BOS) funds can also be used to other thing, that is teacher development and school facilities in the teacher profession development component, education staff and scholl management development, while for school facilities in the maintenance of infrastructure facilities and the multimedia learning tool component. However, not all school met all components of BOS funds, including components for teacher development and school facilities The research was conducted in Semarang City Middle Schools namely SMP Negeri 1, 2 and 19 Semarang City. The research was conducted based in the implementation not meet all the components of BOS. especially the teacher development component and school facilities components. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of school operational assistance (BOS) funds for teacher development and school facilities in Semarang City Junior High Schoold and to identify and analyze the factors that influence the implementation of school operational assistance (BOS) funds for teacher developments and school facilities in Semarang City Middle School. The researcher uses the van Meter and van Horn Implementation model with top-down approach. Based on research, the implementation of school operational assistance (BOS) funds for teacher development and school facilities is still not optimal, due to the influence of standar and objective factor which is lack of certainty and judgment in using teacher development and school facilities components and there is no reward given to school for maximizing the use of BOS funds to provide a stimulus for schools as implementor*

**Keywords :** *implementation, assistance operation school, teacher development, school facilities*

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah proses ketika seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk – bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat dia hidup, proses sosial ketika orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol ( khususnya yang datang dari sekolah ) sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan sosial dan kemampuan individu yang optimum ( *Dictionary of Education* ).

Di Indonesia pendidikan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting karena dapat menunjang kesejahteraannya. Masyarakat sudah sadar bahwa pendidikan sangat penting karena pendidikan merupakan bentuk salah satu dari investasi untuk menghadapi masa depan. Dengan melihat pendidikan di suatu negara dapat diketahui sejauh mana pemerintah memberikan pelayanan kesejahteraan untuk masyarakat nya jika pendidikan di suatu negara sangat mudah didapat dan merata berarti negara tersebut adalah negara yang sejahtera namun jika sebaliknya dapat diartikan bahwa pemerintah kurang memperhatikan betapa pentingnya pendidikan untuk masyarakatnya. Banyak masalah global maupun nasional yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan disuatu negara. Masalah yang dihadapi menjadi masalah global dan nasional. Masalah global bersumber dari laporan OECD ( *Organisation for economic co-operation and development* / kerjasama ekonomi dan pembangunan ) tahun 2003 mencakup : (1) peningkatan IPTEK yang pesat yang membutuhkan penyesuaian budaya ( *culture lag* ), (2) produktivitas tenaga kerja yang rendah “ tenaga kerja terbesar merupakan *unskill labor* ( buruh bangunan, buruh perkebunan, TKI/TKW ). (3) kemampuan membaca siswa menduduki urutan ke-39, (4) kemampuan matematika urutan ke-39, (5) kemampuan sains urutan ke-38 dari 41

negara maju dan berkembang.(Fattah, Nanang 2012:29)

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas pemerintah yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang salah satunya adalah Biaya Operasional Sekolah ( BOS ). BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menyebutkan komponen-komponen penggunaan dana BOS sebagai berikut :

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Penerimaan Peserta Didik Baru
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
5. Pengelolaan Sekolah
6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah
7. Langganaan Daya dan Jasa
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
9. Pembayaran Honor
10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
11. Biaya Lainnya

Dana BOS memang bertujuan untuk meningkatkan APK ( Angka Partisipasi Kasar ) yaitu dengan memberikan sejumlah dana kepada siswa untuk bisa menempuh pendidikan tetapi dana bos juga dapat digunakan untuk

Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, Pengembangan Profesi guru, dan lain-lain.

Dari data yang didapatkan oleh peneliti penggunaan dana BOS SMP Kota Semarang yang digunakan untuk komponen-komponen setiap tahunnya pertriwulan pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Presentase Komponen Dana BOS**

Tahun	Komponen Pengembangan Guru	Komponen Fasilitas Sekolah (Perawatan dan Pengadaan alat Pembelajaran)
2017	3%	13%
2018	2%	12%

Sumber: <https://bos.kemdikbud.go.id>

Dari keseluruhan dana bos hanya sebagian kecil saja yang digunakan untuk menunjang pengembangan guru dan fasilitas sekolah jika di presentasikan dari jumlah keseluruhan pengembangan guru hanya mendapatkan 2-3% dan untuk fasilitas sekolah sebanyak 13% dari jumlah dana keseluruhan setiap tahunnya. Dana BOS paling banyak digunakan untuk biaya aktifitas pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa sebanyak 27%. Jika memang pengembangan guru dan fasilitas sekolah kurang di prioritaskan apakah cukup untuk menjangkep kepentingan siswa dan dari jumlah SMP di Kota Semarang yang menerima dana bos tidak semuanya menggunakan dana bos untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah sehingga penggunaan dana BOS kurang maksimal.

Menurut rekapitulasi laporan penggunaan dana BOS tingkat SMP di Kota Semarang yang peneliti dapatkan dari portal BOS di <https://bos.kemdikbud.go.id/> mengatakan bahwa tidak semua sekolah menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah. berikut adalah laporan rekapitulasi

penggunaan dana BOS SMP di Kota Semarang tahun 2016 yang sudah peneliti rangkum.

**Tabel 2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Dana BOS SMP Kota Semarang 2016**

Ket	Pengembangan Guru	Komponen Perawatan Sekolah	Komponen pengadaan peralatan pembelajaran
Terpenuhi	136 sekolah	148 sekolah	102 sekolah
Tidak terpenuhi	41 sekolah	19 sekolah	75 sekolah

Sumber: <https://bos.kemdikbud.go.id>

Berdasarkan tabel 2. ada 41 sekolah yang tidak menggunakan atau mengalokasikan dana BOS untuk pengembangan guru dan ada sekitar 19 dan 75 sekolah yang tidak menggunakan dana BOS untuk fasilitas sekolah. Karena peneliti berfokus bagaimana penggunaan dana BOS terhadap pengembangan guru dan fasilitas sekolah maka bisa dilihat di tabel 1. dan 2. yang menunjukkan tidak semua sekolah SMP baik negeri maupun swasta yang menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah serta penggunaannya pun tidak besar seperti kegiatan lainnya. Walaupun tujuan dari dana BOS ini adalah untuk membiayai kegiatan operasional sekolah tetapi bukan berarti mengesampingkan 2 hal tersebut. Padahal tenaga pendidik juga penting untuk mendukung walaupun untuk menggunakan dana BOS guna pengembangan guru ada beberapa syarat yang harus dipatuhi seperti yang tertera di permendikbud nomor 1 tahun 2018 yaitu :

1. Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/ Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Bagi sekolah yang memperoleh hibah/ block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang

sama, hanya diperbolehkan menggunakan BOS untuk biaya transport apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut

2. Menghadiri seminar terkait langsung dengan peningkatan guru dan tenaga kependidikan, apabila ditugaskan oleh sekolah. Biaya dapat dibayarkan meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan/atau akomodasi apabila seminar diadakan di luar sekolah
3. Mengadakan workshop/lokakarya untuk peningkatan mutu, seperti dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum, silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengembangan dan/atau penerapan program penilaian kepada peserta didik. Biaya yang dapat dibayarkan meliputi fotokopi, konsumsi guru peserta *workshop/lokakarya* yang diadakan di sekolah dan/atau biaya nara sumber dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum daerah.

Selain perpustakaan penggunaan dana BOS juga bisa digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan Sarana dan Prasarana sekolah yang sudah ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pengecatan, perbaikan atap bocor, dan/atau perbaikan pintu dan/atau jendela
2. Perbaikan mabeler, termasuk pembelian mebeler di kelas untuk peserta didik/guru jika mebeler yang ada di kelas sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan.
3. Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan /atau jamban/WC) untuk menjamin kamar mandi dan/atau jamban /WC berfungsi dengan baik.
4. Perbaikan saluran pembuangan dan/atau saluran air hujan.
5. Perbaikan lantai dan/atau perawatan fasilitas sekolah lainnya.

Dana BOS juga bisa digunakan untuk melakukan pengadaan peralatan pembelajaran yang terdapat dalam komponen pembelian alat multimedia pembelajaran adalah sebagai berikut :

1. komputer/satu set komputer
2. Printer
3. Laptop
4. Proyektor

Dengan beberapa hal diatas apakah implementasi program ini sudah dikatakan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA BOS UNTUK PENGEMBANGAN GURU DAN FASILITAS SEKOLAH DI SMP KOTA SEMARANG”**

## **B. TUJUAN**

Tujuan PenelitiAn ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana penggunaan dana BOS untuk Pengembangan Guru dan Fasilitas sekolah di SMP Kota Semarang.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan dana bos untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah di SMP Kota Semarang.

## **C. TEORI**

1. Administrasi Publik

Perkembangan Ilmu Administrasi Negara telah mengalami pergeseran titik tekan dari *administration of public* dimana negara sebagai agen tunggal implementasi fungsi negara/pemerintah, yang menekankan fungsi negara/pemerintah dalam *public service* ke *administration by public* yang berorientasi pada *public demand are differentiated* dalam arti fungsi negara/pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik tekan pada *putting the customor in the driver sit*, tidak lagi sebagai faktor atau aktor utama atau sebagai *driving forces*. Perubahan besar terjadi pada makna *public* sebagai menitikberatkan pada *customer's oriented*

atau *customer's approach*. Menitikberatkan kepada komparabilitas diantara aktor kebijakan yaitu *state* ( pemerintah ), *private* ( sektor swasta ), dan *civil society* atau masyarakat madani. Sering perubahan tersebut, kata *public* telah bergeser ke arah kepentingan publik. ( Suwitri, Sri: 2009 ).

## 2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik dipandang sebagai tindakan pemerintah : Thomas R. Dye mengemukakan kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.” Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu. (Winarno, Budi 2013:20)

Kebijakan publik juga memiliki proses sebelum dilaksanakan kebijakan tersebut. Proses kebijakan sangatlah kompleks karena saling berpengaruh tahap satu dengan tahap yang lainnya yang nantinya kebijakan tersebut akan menjadi “*life cycle*” beberapa ahli mengemukakan tentang proses kebijakan. Kebijakan publik dapat lebih mudah dipahami jika dikaji tahap demi tahap. Inilah yang menjadikan kebijakan publik menjadi “penuh warna”, dan kajiannya amat dinamis. Berbicara proses kebijakan publik William Dunn (Winarno, Budi 2007:32) mengemukakan proses kebijakan sebagai berikut :

1. Perumusan masalah / Penyusunan Agenda  
Memberikan informasi mengenai kondisi – kondisi yang menimbulkan masalah
2. Forecasting / Formulasi Kebijakan  
Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan.
3. Rekomendasi Kebijakan / Adopsi Kebijakan  
Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif

kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi

4. Monitoring Kebijakan / Implementasi Kebijakan  
Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya
5. Evaluasi Kebijakan / Penilaian Kebijakan

## 3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab: 2006:64), sedangkan Van Meter dan Van Horn mengemukakan Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65)

Van Meter dan Van Horn mengemukakan model implementasi kebijakan publik menunjuk ada enam variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya / Sumber-sumber kebijakan, Komunikasi antar badan pelaksana, Karakteristik badan pelaksana, Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik, Sikap pelaksana (Winarno, Budi 2013:164). Maka dari itu pencapaian implementasi atau kinerja kebijakan dapat dilihat kesesuaian dari enam variabel tersebut. Beberapa variabel yang terdapat dalam model Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan  
standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai

oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

## 2. Sumber Daya / Sumber-Sumber Kebijakan

Disamping ukuran – ukuran dasar dan tujuan – tujuan kebijakan, yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya / sumber – sumber yang tersedia. Van Meter dan Van Horn mengatakan ada dua sumber yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Dana (*Financial*) dan Sumberdaya Manusia

## 3. Hubungan Antar Organisasi

Menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya : seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga merujuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program / kebijakan.

## 4. Karakteristik badan pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn menunjuk pada struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasarwarsa yang lalu. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

## 6. Sikap Pelaksana

Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “ virus weberian “ yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

## D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, wawancara dan dokumen

## E. LOKUS PENELITIAN

Penelitian ini yang akan menjadi fokus atau hal yang akan diteliti oleh peneliti adalah Implementasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pengembangan Guru dan Fasilitas Sekolah di SMP Kota Semarang, Lokus yang di pilih oleh peneliti adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang dan SMP Negeri 01, 02 dan 19 Semarang di kota Semarang.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

### PENELITIAN

#### A. Implementasi Penggunaan Dana BOS untuk Pengembangan Guru dan Fasilitas Sekolah SMP di Kota Semarang

##### 1. Tahap Alokasi

Secara umum sosialisasi penggunaan dana BOS yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah dijalankan dengan baik yaitu setiap tahun dilakukan minimal satu kali yang dihadiri seluruh kepala sekolah dan bendahara BOS dari setiap sekolah. sosialisasi membahas tentang Juknis BOS dan menekankan pada anak tetapi tidak ada hal khusus yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah. Sosialisasi juga dilakukan oleh tiap sekolah dengan kebijakannya masing-masing sesuai kebutuhan.

## 2. Pengalokasian Dana BOS untuk pengembangan guru dan Fasilitas Sekolah

Alokasi dana BOS ditentukan oleh sekolah itu sendiri yang melibatkan seluruh pihak yang ada disekolah tersebut yang bentuknya suatu masukan atau saran. Hal tersebut kemudian dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas dari sekolah tersebut yang nantinya akan dimasukkan ke dokumen RKAS. Walaupun alokasi dana BOS tersebut seluruhnya di serahkan kepada pihak sekolah tetapi pihak sekolah harus tetap berpegang pada pedoman yaitu Juknis BOS. Penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru juga tidak ada presentase minimum dan maksimal yang di atur oleh Juknis BOS selama pihak sekolah setuju untuk melaksanakan kegiatan hal itu tidak jadi masalah. Walaupun demikian pihak sekolah hanya bisa melaksanakan kegiatan kurang lebih 4 kali dalam satu tahun dan kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dana BOS harus dibagi-bagi secara bijak untuk semua kegiatan selain pengembangan guru.

Penggunaan dana BOS tersebut dibagi menjadi 2 dalam alokasi dana BOS untuk fasilitas sekolah yaitu belanja barang dan jasa yang antara lain terdiri dari komponen langganan daya dan jasa, dan komponen pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana. Untuk belanja barang dan jasa pihak sekolah mempertimbangan dengan melihat bagaimana kondisi dari fasilitas yang dimiliki oleh sekolah tersebut sehingga untuk mengalokasi dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sekolah relatif lebih mudah karena semua pihak yang ada disekolah bisa melihat langsung bagaimana keadaan dari fasilitas tersebut. Disisi lain pengalokasian dana untuk belanja modal yang dimana bersifat inventaris seperti satu set komputer, LCD dan Laptop haruslah berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar disekolah. Pihak sekolah harus mempertimbangkan barang yang akan dibeli dapat menunjang dan mendukung

kegiatan belajar mengajar dan kegiatan manajemen sekolah. Pihak sekolah wajib mencatat semua barang yang dibeli menggunakan dana BOS sebagai inventaris sekolah.

## 3. Penggunaan Dana BOS untuk Pengembangan Guru dan Fasilitas Sekolah

Menurut data dari <http://bos.kemendikbud.go.id> terkait dengan penggunaan dana untuk pengembangan guru di SMP Kota Semarang pada tahun 2016 sampai 2018 bahwa penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru digunakan sebesar 2-5% dari total penggunaan dana BOS. sedangkan untuk SMP Negeri Di Kota Semarang penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dari tahun 2016 sampai 2018 hanya sebesar 2-3 % saja.

Pengembangan guru kurang lebih sebanyak 4 kali dalam satu tahun dengan alasan banyaknya kegiatan yang harus dipenuhi dan kegiatan terkait dengan pengembangan guru yang dilakukan sekolah adalah MGMP dan kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan yang sering dilakukan dengan menggunakan dana BOS adalah kegiatan pelatihan *e-learning*. Selain itu pihak sekolah juga bisa menggunakan dana BOS untuk kegiatan yang tidak terkait dengan keilmuan seperti kegiatan jasmani dan rohani. Kegiatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam komponen pengembangan guru, tenaga kependidikan dan pengembangan manajemen sekolah. Sedangkan sekolah yang tidak menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru mengatakan bahwa prioritas utama dari dana BOS ini adalah untuk peserta didik jadi untuk pengembangan guru sekolah hanya mengikuti kegiatan bedah SKL atau standar kompetensi lulusan yang dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang diadakan pemerintah kota dalam meningkatkan kompetensi lulusan sekolah.

Sepanjang tahun 2016 sampai 2018 SMP di Kota Semarang selalu menggunakan dana BOS untuk perbaikan

dan pemeliharaan fasilitas sekolah dan penggunaan dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sekolah cukup besar persentasenya yaitu rata-rata sekitar 15% dari jumlah total penggunaan dana BOS setiap tahunnya. Pihak dinas juga tidak mengatakan dan menganjurkan batasan dalam menggunakan dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Sedangkan penggunaan dana BOS untuk pengadaan peralatan pembelajaran terdapat batasan jumlah unit dan nominal harga. Pihak sekolah juga harus mempertimbangkan dalam melakukan pembelian harus dapat membantu dan mendukung proses belajar mengejar disekolah. Sepanjang tahun 2016 sampai 2018 penggunaan dana BOS untuk pengadaan peralatan pembelajaran rata-rata sebesar 5% dari jumlah total.

Penggunaan dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan bisa dilakukan dalam beberapa hal antara lain perbaikan kelas yang menyangkut tentang pintu kelas, meja kelas, kursi kelas dan lantai, perbaikan atap dan perbaikan kamar mandi. Pihak sekolah paling sering menggunakan dana BOS untuk fasilitas sekolah pada perbaikan dan pemeliharaan kamar mandi karena fasilitas tersebut paling sering rusak dan dipakai oleh semua pihak yang ada disekolah. Sedangkan untuk penggunaan dana BOS untuk pengadaan peralatan pembelajaran bisa digunakan untuk pembelian satu set komputer, LCD dan laptop yang dimana terdapat batasan jumlah unit dan nominal harga. Pihak sekolah yang peneliti wawancarai mengatakan penggunaan dana BOS untuk pengadaan peralatan pembelajaran seperti unit komputer sudah dilakukan pada dua tahun terakhir yang membeli dengan jumlah maksimal yang tertulis di Juknis BOS atas inisiatif dari pihak sekolah itu sendiri karena memang tidak ada anjuran dari pihak lain atas harusnya membeli peralatan pembelajaran terus menerus setiap tahunnya.

#### **4. Manfaat yang diperoleh**

Menyelenggarakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan guru seperti *pertama*, MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang dimana kegiatan tersebut adalah wadah untuk guru dengan mata pelajaran yang sama bertukar pikiran terkait dengan profesionalisme guru dalam pembelajaran dan evaluasi peserta didik yang berdampak pada mutu pendidikan di sekolah. *kedua*, pihak sekolah juga mengadakan kegiatan pelatihan atau *workshop*. Sekolah mengadakan kegiatan pelatihan IT dan pelatihan *e-learning* yang kedua hal tersebut dapat menambah wawasan guru yang akan meningkatkan mutu guru di sekolah. pelatihan IT guru-guru diberikan pelatihan bagaimana menggunakan teknologi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, mengolah nilai serta mengevaluasi peserta didik dan manfaat yang di dapatkan oleh guru adalah guru tidak jadi *gaptek* dalam menggunakan teknologi dan pelatihan *e-learning* adalah wadah baru yang digunakan untuk mempermudah dalam mengajar dan menyampaikan materi serta guru bisa melakukan ujian harian dan *tryout* secara online.

Sedangkan penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah memiliki manfaat untuk memastikan agar fasilitas-fasilitas disekolah dapat terjaga kondisinya dan bisa terus dipakai oleh semua pihak di dalam sekolah yang mana termasuk dalam komponen pemeliharaan sarana dan prasarana. Selain itu penggunaan dana BOS untuk pengadaan peralatan pembelajaran dapat menunjang proses kegiatan belajar mengajar seperti kegiatan *e-learning* disekolah yang dimana sekolah harus mempunyai sejumlah unit komputer untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Unit komputer yang dibeli menggunakan dana BOS ini juga bisa sampai melakukan UNBK mandiri. Penggunaan dana BOS juga bisa dapat membantu kegiatan manajemen sekolah seperti *e-rapot* yang memudahkan para guru untuk memproses nilai peserta didik.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Penggunaan Dana BOS untuk Pengembangan Guru dan Fasilitas Sekolah di SMP Kota Semarang**

### **1. Faktor Pendukung**

Faktor Pendorong yang pertama adalah faktor standar dan tujuan kebijakan. Dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah sudah ada ketentuan yang sudah tertulis di dalam Juknis BOS sehingga setiap sekolah bisa menggunakan dana BOS untuk 2 hal tersebut tanpa melanggar aturan.

Komunikasi juga menjadi faktor pendukung dalam implementasi penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah karena Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai pelaksana tingkat kota selalu memberikan kesempatan kepada setiap sekolah untuk melakukan komunikasi mulai dari sosialisasi, perencanaan hingga perubahan penggunaan dana BOS lewat apapun dan kapanpun hingga konsultasi akan dilayani oleh pihak Dinas. Komunikasi yang terjadi di dalam sekolah itu sendiri juga menjadi faktor pendorong karena semua pihak yang ada di sekolah termasuk guru mempunyai hak yang sama dalam mengajukan saran dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah.

Karakteristik badan pelaksana juga menjadi faktor pendukung dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah karena dengan adanya inisiatif dari sekolah itu sendiri sangat mempengaruhi apakah menggunakan dana BOS untuk kedua hal tersebut atau tidak karena yang menentukan alokasi dan penggunaan sepenuhnya di tangan sekolah terutama kepala sekolah.

Disisi lain kondisi dan sikap yang baik dari Dinas Pendidikan yang selalu mendukung dengan apa yang diputuskan oleh sekolah termasuk penggunaan dana BOS untuk guru dan fasilitas sekolah ini

juga mempengaruhi keputusan sekolah dalam menggunakan dana BOS.

### **2. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah yang pertama adalah faktor standar dan tujuan kebijakan yaitu tidak adanya penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang pada pihak sekolah dan tidak adanya kewajiban serta *reward* yang diberikan kepada pihak sekolah yang seharusnya dapat menstimulus dalam penggunaan dana BOS, hal ini yang menyebabkan tidak semua sekolah tidak menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian dengan dana yang diterima setiap tahunnya yaitu sebesar Rp 1.000.000/anak/tahun pihak sekolah mengatakan bahwa jika pihak sekolah ingin memenuhi semua komponen-komponen BOS termasuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah adalah tidak cukup karena banyaknya kegiatan yang harus dipenuhi.

Karakteristik badan pelaksana juga menjadi penghambat dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah karena tidak semua sekolah terutama kepala sekolah yang berinisiatif dalam menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah. Seperti SMP 2 Kota Semarang yang tidak menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru karena penekanan dana BOS ini hanya untuk peserta didik. Tidak adanya anjuran atau intruksi khusus dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah menjadi faktor penghambat dalam penggunaan dana BOS.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

#### **1. Implementasi Penggunaan Dana BOS untuk Pengembangan Guru dan Fasilitas Sekolah SMP di Kota Semarang**

##### **a. Tahap Sosialisasi**

Sosialisasi penggunaan dana BOS di Kota Semarang secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. Dinas Pendidikan Kota Semarang selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh sekolah di Kota Semarang dan menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada Juknis BOS mulai dari data peserta didik hingga tahap laporan. Tetapi Dinas Pendidikan tidak memberikan penjelasan secara detil tentang bagaimana penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah.

##### **b. Pengalokasian dana BOS untuk Pengembangan Guru dan Fasilitas Sekolah**

Alokasi dana BOS untuk pengembangan guru terdapat dalam komponen pengembangan guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah. Pengalokasian untuk komponen tersebut belum dilakukan oleh semua SMP Di Kota Semarang karena pihak sekolah merasa penggunaan dana BOS itu penekanannya hanya untuk anak saja jadi dengan mengesampingkan komponen lain hal itu tidak jadi masalah selama penggunaan dana BOS tidak menyalahi aturan.

Alokasi dana BOS untuk pengembangan guru terdapat dalam komponen pengembangan guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah. Pengalokasian untuk komponen tersebut belum dilakukan oleh semua SMP Di Kota Semarang karena pihak sekolah merasa penggunaan dana BOS itu penekanannya hanya untuk anak saja jadi dengan mengesampingkan komponen lain hal itu tidak jadi masalah selama penggunaan dana BOS tidak menyalahi aturan.

##### **c. Penggunaan dana BOS untuk Pengembangan Guru dan Fasilitas Sekolah**

Penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru bisa dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain Musyawarah Guru Mata Pelajaran, kegiatan pelatihan atau *workshop* dan menghadiri seminar terkait dengan pengembangan guru dan yang dibiayai adalah kegiatan pengembangannya bukan gurunya. Di SMP Kota Semarang rata-rata hanya menggunakan 2-3% dari jumlah total. Dana BOS untuk kegiatan pengembangan guru ini dan sekolah hanya bisa melaksanakan 4 kali kegiatan dalam satu tahun. Tetapi angka tersebut tidak dibilang kecil atau besar oleh Dinas Pendidikan karena memang tidak ada batas minimal dan maksimal dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru.

Penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah bisa digunakan untuk memperbaiki, memelihara dan pengadaan fasilitas di sekolah pada setiap tahunnya yang akan masuk dalam belanja barang dan jasa dan belanja modal. Penggunaan dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan semua sekolah sudah memenuhi hal tersebut karena lebih mudah hanya dengan melihat kondisi fasilitas, pihak sekolah bisa menggunakan untuk hal tersebut. Sedangkan untuk pengadaan peralatan pembelajaran haruslah berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar dan tidak semua sekolah melakukan pengadaan karena sudah memenuhi pada dua tahun sebelumnya.

##### **d. Manfaat yang diperoleh**

Manfaat penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru bisa dirasakan oleh pihak sekolah yang menggunakan dana BOS untuk komponen-komponen tersebut. Kegiatan pengembangan guru tersebut antara lain Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang berfungsi sebagai, kegiatan pelatihan dan seminar terkait pengembangan guru yang bertujuan seperti sertifikasi pada guru tetapi hal tersebut jarang dilakukan karena hanya boleh

menghadiri seminar yang diadakan oleh pemerintah saja. Ketiga kegiatan tersebut tentunya dapat meningkatkan mutu guru disekolah yang akan berdampak pada mutu sekolah itu sendiri.

Manfaat penggunaan dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan sekolah adalah pemeliharaan fasilitas sekolah sendiri agar kondisi sekolah bisa terjaga, fasilitas sekolah yang terjaga akan selalu baik dan siap digunakan untuk kegiatan operasional sekolah. Selain penggunaan dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan tersebut diharapkan bisa melakukan penghematan dalam pengadaan sarana dan prasarana di sekolah. Manfaat yang didapat dari penggunaan dana BOS untuk pengadaan peralatan pembelajaran sekolah antara lain untuk peserta didik penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah dalam hal pengadaan peralatan pembelajaran dapat menunjang kegiatan belajar mengajar disekolah hingga melakukan kebijakan nasional seperti UNBK. Sedangkan untuk sekolah dapat memudahkan kegiatan manajemen sekolah misalnya melakukan kegiatan *e-rapor*.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan Dana BOS untuk Pengembangan Guru dan Fasilitas Sekolah SMP di Kota Semarang**

### **a. Faktor Pendukung**

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan faktor-faktor pendukung implementasi penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah di SMP Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa adanya standar dan sasaran kebijakan yaitu Juknis BOS yang mengatur tentang dua hal tersebut dapat memudahkan pihak sekolah dalam mengalokasikan hal apa saja yang boleh dalam menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah sehingga pihak sekolah tidak melanggar aturan walaupun menggunakan dana BOS selain untuk peserta didik.

Komunikasi, Kondisi ekonomi, sosial dan politik serta sikap pelaksana juga menjadi faktor pendukung dalam

penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah karena Dinas Pendidikan Kota Semarang selalu mendukung dengan apa yang menjadi keputusan pihak sekolah dalam mengalokasikan hingga menggunakan dana BOS untuk guru dan fasilitas sekolah.

inisiatif sekolah terutama kepala sekolah yaitu faktor karakteristik badan pelaksana menjadi faktor yang sangat penting dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah karena memang pihak sekolah yang sepenuhnya menentukan dana BOS untuk melakukan kegiatan-kegiatan sekolah. contohnya SMP Negeri 1 Kota Semarang yang berinisiatif dalam melakukan kegiatan pelatihan *e-learning* karena dirasa guru-guru juga butuh berkembang.

### **b. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dalam implementasi penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah di SMP Kota Semarang yaitu standar dan sasaran kebijakan. Yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang yang tidak memberikan penilaian dan kewajiban dalam menggunakan dana BOS pada pihak sekolah sehingga ukuran untuk menilai bagaimana penggunaan dana BOS baik atau buruk tidak bisa dilihat dan tidak adanya pemberian *reward* kepada sekolah yang memenuhi semua komponen penggunaan BOS yang dapat menstimulus sekolah-sekolah agar memaksimalkan penggunaan dana BOS.

Faktor penghambat lainnya yang memengaruhi dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah adalah karakteristik badan pelaksana yaitu tidak semua sekolah berinisiatif dalam memenuhi semua komponen. Terlalu patuhnya pihak sekolah dalam memenuhi penggunaan dana BOS untuk kegiatan operasional sekolah menyebabkan berkurangnya inisiatif dalam memenuhi komponen BOS lain

## B. SARAN

Mengadakan kompetisi atau lomba tingkat kota dalam pengelolaan dana BOS dan memberikan *reward* kepada sekolah untuk memberikan stimulus agar lebih memaksimalkan lagi dalam penggunaan dana BOS pada semua komponen dengan begitu faktor-faktor yang menghambat dalam penggunaan dana BOS dapat teratasi karena diadakannya kompetisi atau lomba akan memaksa pemerintah untuk membuat penilaian dalam penggunaan dana BOS sehingga bisa dilihat baik-buruknya dalam penggunaan dana BOS dan pemberian *reward* kepada sekolah akan mempengaruhi inisiatif sekolah dalam memenuhi komponen-komponen BOS termasuk komponen pengembangan guru dan fasilitas sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fattah, Nanang. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. PT. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Salim, Agus. 2006. *Bangunan Teori: Metodologi Penelitian Untuk Bidang Sosial, Psikologi, dan Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Subarsono, A.G. 2015. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Putaka Pelajar
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik : Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penertbit Ombak
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik ( Edisi Revisi )*. Jakarta : Rineka Cipta
- Wahab, Abdul Solichin. 2015. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS

## Sumber Lain

Tentang BOS: Rekapitulasi penggunaan dana BOS SMP Kota Semarang. Dalam <https://bos.kemdikbud.go.id/home/about>; diakses pada tanggal 2 Februari 2018, pukul 20.03 WIB

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018